

Desain Sistem Informasi Geografis untuk Pemantauan Perizinan dan Riwayat Bangunan Sosial Budaya di Kota Cimahi

Andi Moch Januriana¹, Devie Firmansyah², Awaluddin Dongoran³

^{1,2,3} Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Email: amj@stpn.ac.id¹, devief@stpn.ac.id², awaluddindongoran@stpn.ac.id³

Abstrak

Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG). Persyaratan administratif tersebut meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, serta izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 40 ayat (2) huruf b UUBG. Dalam konteks Kota Cimahi, pengelolaan bangunan sosial budaya harus selaras dengan kebijakan dan strategi ruang wilayah yang tertuang dalam RTRW/RDTR, termasuk pengembangan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota seperti Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Kota (KSK). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi geografis (SIG) berbasis web yang dapat digunakan untuk memantau perizinan dan riwayat bangunan sosial budaya di Kota Cimahi. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung identifikasi status kepemilikan, penggunaan, dan kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang wilayah, serta memfasilitasi pemantauan masa berlaku izin dan proses penyelenggaraan bangunan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam perencanaan pengembangan wilayah, pelestarian kawasan cagar budaya, serta penguatan pengelolaan aset daerah. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal aplikasi SIG yang memberikan manfaat strategis bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan efisiensi tata kelola bangunan sosial budaya, memperkuat integrasi data spasial dengan kebijakan RTRW/RDTR, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perizinan dan aset daerah.

Keywords : Sistem Informasi Geografis (SIG), Bangunan Sosial Budaya, Izin Mendirikan Banguanan (IMB), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemantauan Perizinan

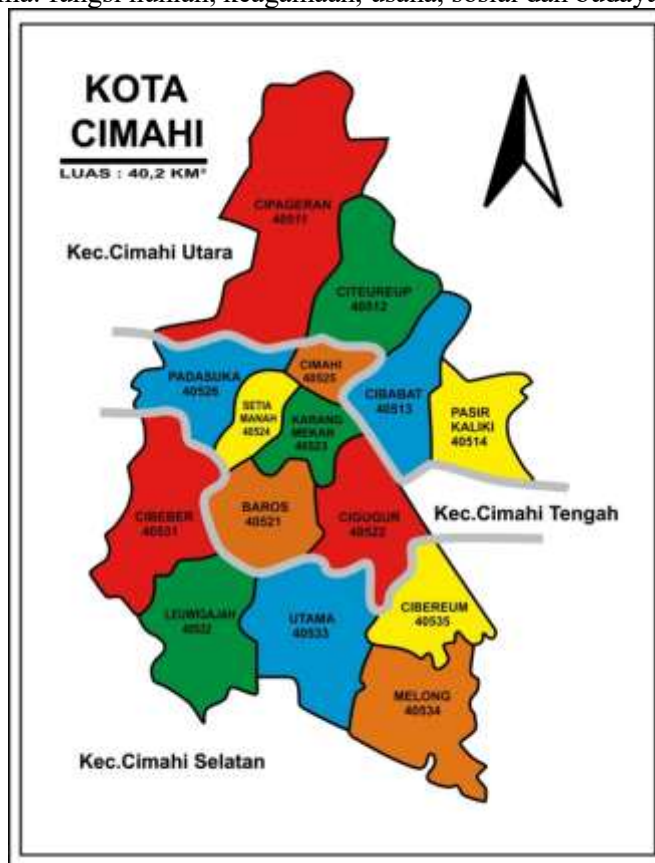
Abstract

Every building in Indonesia must comply with administrative and technical requirements according to its designated function, as regulated by Law No. 28 of 2002 on Buildings. These administrative requirements include land ownership status, building ownership status, and the building permit (IMB), as stated in Article 7 paragraphs (1) and (2), Article 35 paragraph (4), and Article 40 paragraph (2) letter b of the law. In the context of Cimahi City, the management of social and cultural buildings must align with the spatial planning policies outlined in the city's RTRW/RDTR, which include strategies for spatial structure development, spatial pattern planning, and designation of strategic urban areas such as National Strategic Areas (KSN), Provincial Strategic Areas (KSP), and City Strategic Areas (KSK). This study aims to design a web-based Geographic Information System (GIS) to monitor the licensing and historical records of social and cultural buildings in Cimahi City. The application is intended to support the identification of ownership status, usage, and spatial conformity of buildings, track the validity period of permits, and monitor ongoing building operations. Additionally, the system is expected to assist in urban planning, cultural heritage preservation, and asset management by the local government. The result of this research is a prototype GIS application that provides strategic benefits for the City Government of Cimahi in improving the efficiency of social and cultural building management, integrating spatial data with urban planning policies, and enhancing transparency and accountability in licensing and asset governance.

Keywords : Geographic Information System (GIS), Social and Cultural Buildings, Building Permit (IMB), Spatial Planning (RTRW), Permit Monitoring

1. PENDAHULUAN

Bangunan gedung merupakan sarana vital dalam menunjang aktivitas manusia, baik sebagai tempat tinggal, pusat kegiatan sosial, maupun sebagai simbol identitas budaya. Penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia diatur secara komprehensif melalui *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*, yang menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan administratif dan teknis guna menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan [1]. Peraturan pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005*, yang mengklasifikasikan fungsi bangunan gedung menjadi lima kategori utama: fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus [1].



Gambar 1. Wilayah Administrasi Kota Cimahi

Bangunan dengan fungsi sosial dan budaya memiliki karakteristik yang khas karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan publik, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai sosial dan warisan budaya suatu daerah. Fungsi ini mencakup bangunan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebudayaan[2]. Dalam konteks Kota Cimahi, keberadaan bangunan sosial budaya seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan pusat kebudayaan menjadi bagian penting dari struktur ruang kota. Pengelolaan bangunan-bangunan ini harus selaras dengan kebijakan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)* dan *Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)* Kota Cimahi, serta memperhatikan kawasan strategis kota, provinsi, dan nasional.

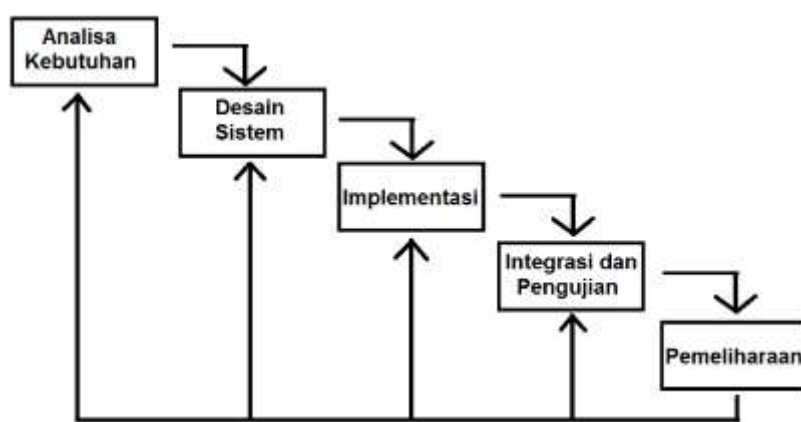
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya sistem pendataan dan pemantauan bangunan sosial budaya, khususnya dalam integrasi data spasial dan administratif. Ketiadaan sistem informasi yang mampu menyajikan data secara spasial dan real-time menyulitkan proses pengawasan, perencanaan, serta pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis teknologi informasi, khususnya *Sistem Informasi Geografis (SIG)*, untuk mendukung pengelolaan bangunan sosial budaya secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi geografis berbasis web yang dapat digunakan untuk memantau perizinan dan riwayat bangunan sosial budaya di Kota Cimahi. Sistem ini diharapkan mampu menyajikan data teknis dan administratif secara spasial, mendukung identifikasi kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang, serta memfasilitasi pemantauan masa berlaku izin dan proses penyelenggaraan bangunan. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi alat bantu strategis dalam perencanaan pengembangan wilayah, pelestarian kawasan cagar budaya, serta penguatan pengelolaan aset daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web. Metode R&D dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada pengembangan sistem, bukan sekadar pengujian hipotesis. Menurut [3], metode R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam konteks ini, produk yang dikembangkan adalah sistem informasi untuk pemantauan perizinan dan riwayat bangunan sosial budaya di Kota Cimahi.

Untuk mendukung proses pengembangan sistem secara sistematis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan System Development Life Cycle (SDLC). Menurut [4] SDLC merupakan kerangka kerja yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, yang mencakup tahapan-tahapan seperti analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi pada setiap tahapannya. Dengan demikian, SDLC sangat relevan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi dan pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 2. Metode Waterfal

1. Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan sistem secara detail. Analisis dilakukan terhadap:

- Peruntukan Lahan: Memastikan kesesuaian lokasi bangunan sosial budaya dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW/RDTR).
- Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung: Meliputi status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.
- Persyaratan Teknis Bangunan Gedung: Memastikan bangunan memenuhi standar teknis yang berlaku untuk fungsi sosial budaya.
- Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perancangan sistem agar sesuai dengan regulasi dan kebutuhan pengguna.

2. Desain Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem menggunakan Use Case Diagram untuk memodelkan interaksi antara pengguna dan sistem. Desain mencakup struktur antarmuka, alur proses, serta integrasi data spasial dan administratif agar sistem dapat menyajikan informasi secara komprehensif.

3. Implementasi

Implementasi dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis web menggunakan framework Yii untuk pengembangan frontend dan backend, dikarenakan Framework Yii telah banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena mendukung modularitas dan efisiensi pengembangan [5]. Basis data yang digunakan adalah MySQL, yang dirancang untuk menyimpan data hasil analisis kebutuhan, termasuk informasi perizinan, riwayat bangunan, dan data spasial. Eksistensi spasial memungkinkan untuk menyimpan objek-objek geografis yang dapat dipakai dalam aplikasi SIG [6].

4. Integrasi dan pengujian

Data dari hasil tiga analisis pada tahap analisis kebutuhan diintegrasikan ke dalam sistem agar dapat diakses secara spasial dan administratif. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing,

yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa melihat kode program, untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai spesifikasi. Pemanfaatan metode Balck Box Testing bertujuan untuk dapat mendeteksi kesalahan yang belum terdeteksi sebelumnya guna meningkatkan kualitas perangkat lunak [7]

5. Pemeliharaan

Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh tim pengembang. Pemeliharaan mencakup pendampingan pengguna melalui pelatihan, serta penanganan masalah seperti bug atau pembaruan sistem agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi.

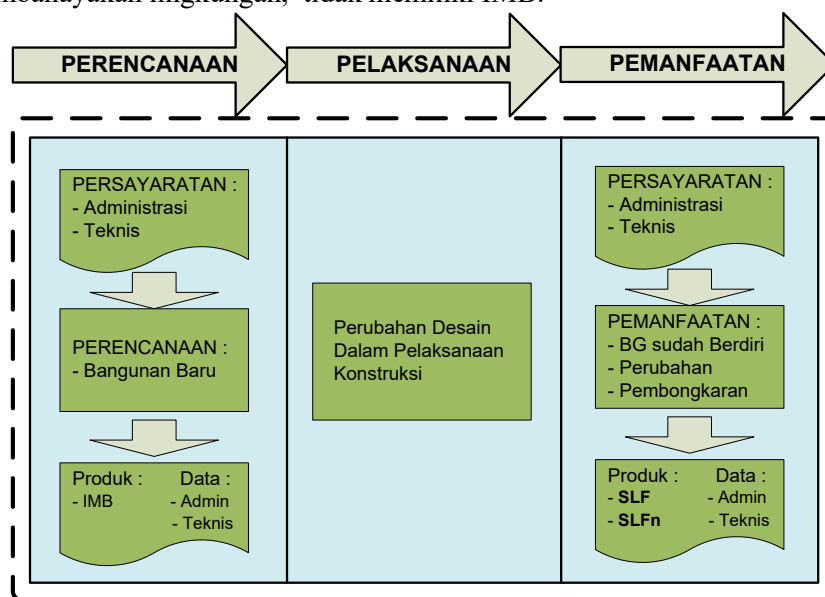
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebutuhan

Sistem Pendataan Bangunan Gedung

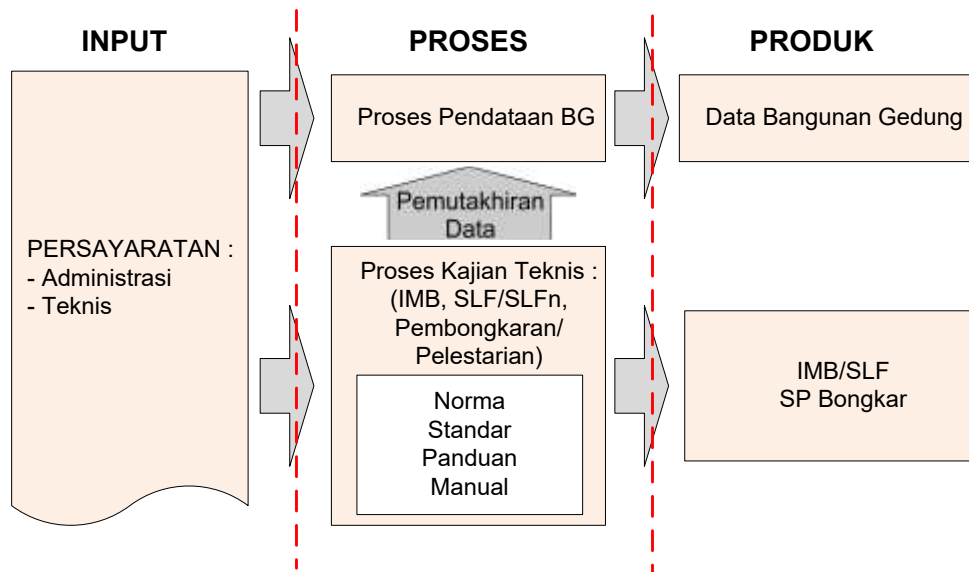
Pada dasarnya kegiatan Pendataan Bangunan Gedung terdiri dari dua macam kegiatan, yaitu meliputi:

- a) Proses Pendataan Bangunan Gedung
Merupakan kegiatan memasukan dan mengolah data bangunan gedung oleh pemerintah daerah sebagai proses lanjutan dari pemasukan dokumen/ pendaftaran bangunan gedung baik pada proses IMB ataupun pada proses SLF dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemda.
- b) Output/Hasil pendataan bangunan gedung
Kegiatan pendataan bangunan gedung dapat menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), sebagai bukti telah terpenuhinya semua persyaratan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung. Pada tahapan proses pendataan bangunan gedung dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:
 1. Tahap perencanaan
Pada tahap ini pendataan bangunan gedung dilakukan pada saat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), hasil akhir dari kegiatan pendataan bangunan gedung pada pra konstruksi ini bisa menjadi dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 2. Tahap Pelaksanaan Pendataan bangunan gedung dilakukan pada akhir proses pelaksanaan konstruksi yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF) sebelum bangunan dimanfaatkan.
 3. Tahap Pemanfaatan Pada tahap ini kegiatan pendataan bangunan gedung dibagi menjadi 2(dua) tahap yaitu:
 - a. Pendataan bangunan gedung pada saat proses perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLFn) yaitu pada saat jatuh tempo masa berlakunya SLFn,
 - b. Pendataan bangunan gedung pada saat Pembongkaran Bangunan Gedung yaitu pada saat bangunan gedung yang akan dibongkar akibat sudah tidak layak fungsi; membahayakan lingkungan, tidak memiliki IMB.



Gambar 3 Konsep Pendataan Bangunan Gedung dilihat dari proses pentahapannya

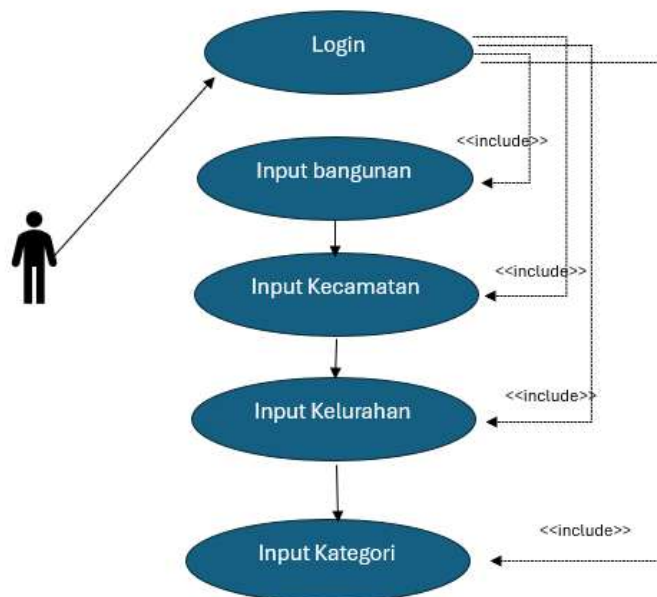
Pada saat pendataan bangunan gedung baik pada tahap PPIMB ataupun SLF dilakukan proses updating database atau pemutakhiran suatu bangunan gedung sehingga diperoleh data yang baru



Gambar 4 Konsep Proses Pendataan Bangunan Gedung dalam kegiatan Admintrasi BG

2. Analisis Perancangan

Pada tahap analisis perancangan, digunakan Use Case Diagram untuk memodelkan interaksi antara pengguna dan sistem. Use Case dipilih karena mampu menggambarkan kebutuhan sistem secara sederhana dan terstruktur, serta memudahkan komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan [8]. Dalam sistem ini, terdapat satu aktor utama yaitu Admin sebagai pengelola aplikasi. Admin harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem, kemudian memiliki hak penuh dalam melakukan input data bangunan, kecamatan, kelurahan, dan kategori. Struktur ini memastikan bahwa aplikasi berfungsi sebagai peruntukan data internal pemerintah Kota Cimahi dalam mengidentifikasi pemantauan perizinan dan riwayat bangunan sosial budaya.

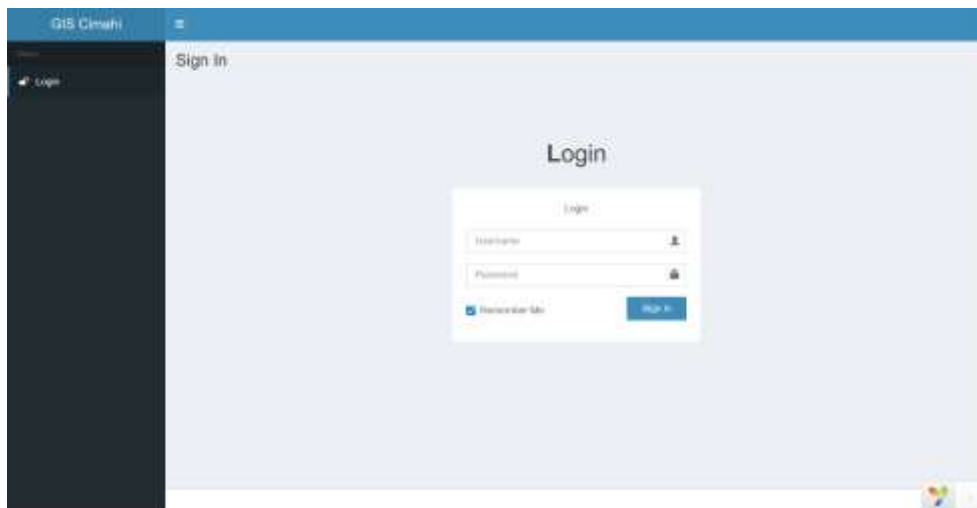


Gambar 5. Use Case Sistem

3. Implementasi Sistem

Sistem Informasi Geografis untuk Pemantauan Perizinan dan Riwayat Bangunan Sosial Budaya di Kota Cimahi menggunakan framework yii, dan untuk databasenya menggunakan MySQL. Berikut adalah implementasi dari Sistem Informasi Geografis untuk Pemantauan Perizinan dan Riwayat Bangunan Sosial Budaya di Kota Cimahi.

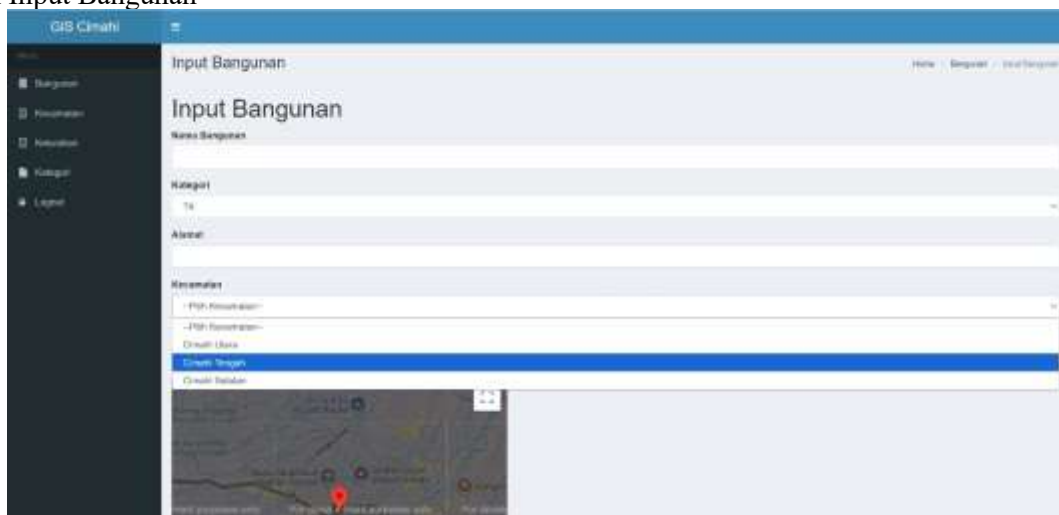
Halaman Utama / Login



Gambar 6 Tampilan halaman utama / Login

Pada Sistem Informasi Geografis untuk Pemantauan Perizinan dan Riwayat Bangunan Sosial Budaya di Kota Cimahi, terdapat akses aktor admin untuk melakukan login sebelum masuk ke dalam sistem, dengan tujuan sebagai keamanan data melalui hak akses sebagai admin.

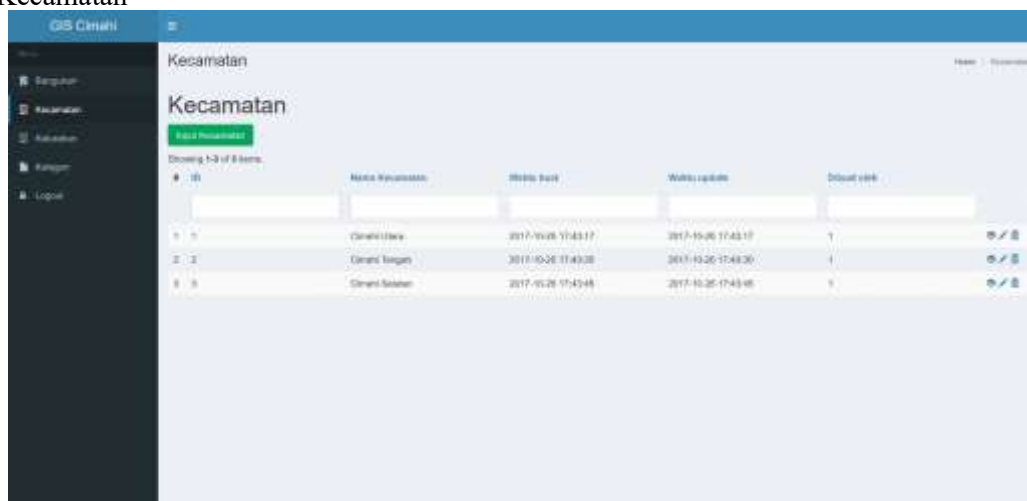
Halaman Input Bangunan



Gambar 7 Tampilan halaman input bangunan

Pada halaman input bangunan dibuat untuk melakukan plotting lokasi bangunan didalam peta disesuaikan berdasarkan koordinat yang telah didapatkan dari hasil pengecekan lapangan.

Halaman Kecamatan



Gambar 8 Tampilan Hasil Input Kecamatan

Didalam halaman kecamatan, admin akan melakukan penginputan nama kecamatan yang ada di daerah Kota Cimahi sebagai identifikasi tempat bangunan sosial budaya berada.

Halaman Kalurahan

ID	Nama Kelurahan	Kecamatan	Waktu Saat	Waktu update
1	Obatal	Cimahi Utara	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
2	Cigayam	Cimahi Utara	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
3	Obongmaju	Cimahi Utara	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
4	Pasarukti	Cimahi Utara	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
5	Banis	Cimahi Tengah	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
6	Gajajar Tengah	Cimahi Tengah	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
7	Cimahi	Cimahi Tengah	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
8	Karang Mekar	Cimahi Tengah	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
9	Pakembaru	Cimahi Tengah	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
10	Satetamanah	Cimahi Tengah	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
11	Cibuarani	Cimahi Selatan	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32
12	Lelepagati	Cimahi Selatan	2017-10-26 17:58:32	2017-10-26 17:58:32

Gambar 9 Tampilan hasil input kalurahan

Halaman kalurahan difungsi kan untuk mengidentifikasi lokasi bangunan sosial budaya yang berada di kalurahan, dan dalam proses penginputan kalurahan dihubungkan dengan kecamatan, sehingga tempat bangunan sosial budaya bisa teridentifikasi berdasarkan kalurahan dan kecamatan.

Halaman Kategori

ID	Kategori	Waktu Saat	Waktu update	Direct Mail
1	TK	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
2	MA	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
3	SLB	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
4	SD	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
5	MI	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
6	SMP	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
7	Mu	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
8	SMA	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
9	SBN	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
10	MA	2017-10-26 17:37:12	2017-10-26 17:37:12	1
11	Pengaman Tinggi	2017-10-26 17:37:13	2017-10-26 17:37:13	1
12	Puskesmas	2017-10-26 17:37:13	2017-10-26 17:37:13	1

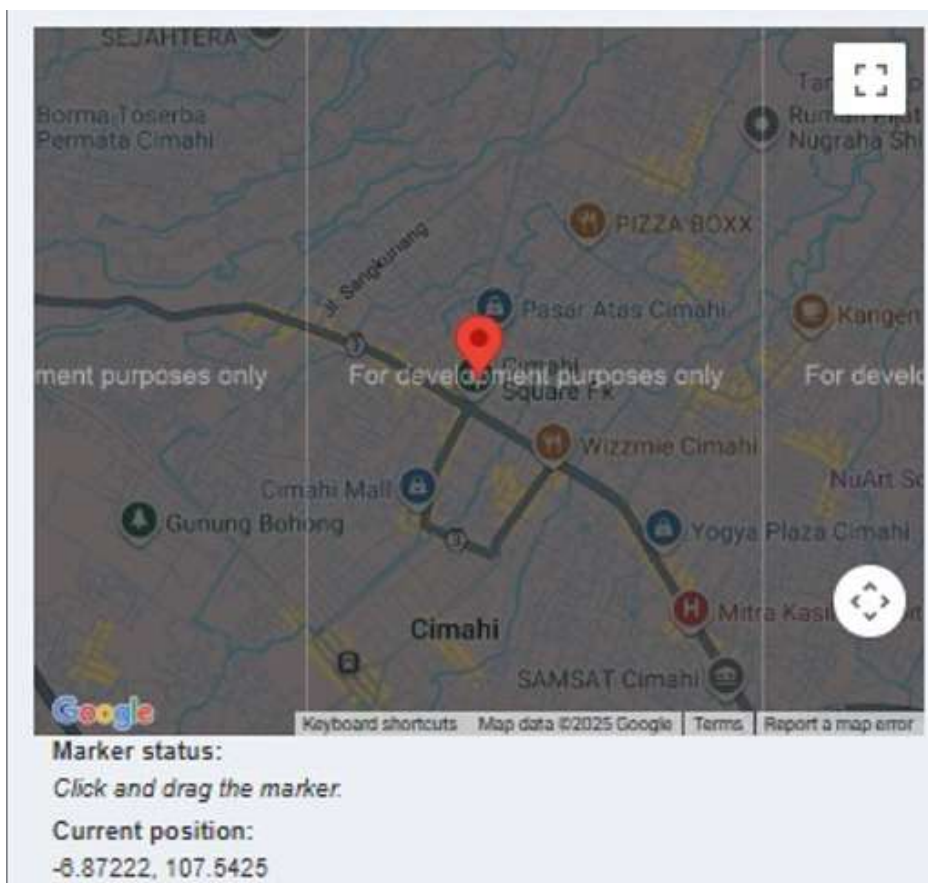
Gambar 10 Halaman Kategori

Pada halaman kategori, admin mengidentifikasi jenis bangunan berdasarkan kategori yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Cimahi, banyak jenis kategori, seperti bangunan TK, SD, SMA, Puskesmas dan lainnya.

4. Integrasi dan Pengujian

a. Integrasi

Proses Integrasi dalam data dari hasil analisis kebutuhan sistem diintegrasikan ke dalam sistem agar dapat diakses secara spasial dan administratif, seperti koordinat lokasi bangunan, nama kalurahan, nama kecamatan dan kategori bangunan, sehingga peta hasil identifikasi bisa memberikan informasi keberadaan tempat bangunan dan perizinan bangunan tersebut.



Gambar 11 Identifikasi Bangunan Cimahi Square

b. Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode **Black Box Testing**, yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa melihat kode program, dengan tujuan untuk mengidentifikasi anomali pada setiap proses kondisi di dalam sistem.

Tabel 1. Pengujian

Data Masuk	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Halaman Login	Aktor admin jika menginputkan username dan password sesuai	Login Sukses	Sesuai
Halaman Login	Aktor admin jika menginputkan username dan password tidak sesuai	Login gagal	Sesuai
Halaman Bangunan	Menampilkan informasi data bangunan, tombol tambah data bangunan, edit data bangunan, dan hapus data bangunan. Pada fungsi input atau tambah data bangunan terdapat form input bangunan baru, pada fungsi edit data berfungsi untuk mengedit data bangunan, dan pada fungsi hapus data bangunan untuk menghapus data bangunan.	List Informasi letak bangunan, jenis bangunan status bangunan, menyimpan data inputan bangunan, mengedit data bangunan, dan menghapus data bangunan.	Sesuai
Halaman Kecamatan	Menampilkan informasi data kecamatan, tombol tambah data kecamatan, edit data kecamatan, dan hapus data kecamatan. Pada fungsi input atau tambah data kecamatan terdapat form input kecamatan baru, pada fungsi edit data berfungsi untuk mengedit data kecamatan, dan pada fungsi hapus data kecamatan untuk menghapus data kecamatan.	List Informasi letak kecamatan, menyimpan data inputan kecamatan, mengedit data kecamatan, dan menghapus data kecamatan.	Sesuai

Data Masuk	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Halaman Kelurahan	Menampilkan informasi data Kelurahan, tombol tambah data Kelurahan, edit data Kelurahan, dan hapus data Kelurahan. Pada fungsi input atau tambah data Kelurahan terdapat form input Kelurahan baru, pada fungsi edit data berfungsi untuk mengedit data Kelurahan, dan pada fungsi hapus data Kelurahan untuk menghapus data Kelurahan.	List Informasi letak Kelurahan, menyimpan data inputan Kelurahan, mengedit data Kelurahan, dan menghapus data Kelurahan.	Sesuai
Halaman Kategori	Menampilkan informasi data Kategori, tombol tambah data Kategori, edit data Kategori, dan hapus data Kategori. Pada fungsi input atau tambah data Kategori terdapat form input Kategori baru, pada fungsi edit data berfungsi untuk mengedit data Kategori, dan pada fungsi hapus data Kategori untuk menghapus data Kategori.	List Informasi letak Kategori, menyimpan data inputan Kategori, mengedit data Kategori, dan menghapus data Kategori.	Sesuai

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan sistem, yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pemerintah Kota Cimahi. Pemeliharaan meliputi pendampingan pengguna melalui pelatihan, perbaikan bug, pembaruan sistem sesuai regulasi, serta optimasi performa. Hal ini sejalan dengan penelitian [9] yang menekankan bahwa pemeliharaan sistem informasi berbasis web merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan keandalan sistem.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang termasuk kedalam bangunan sosial budaya di Kota Cimahi terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, laboratorium dan bangunan cagar budaya.
2. Sarana pendidikan di Kota Cimahi terdiri dari :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 103 (seratus tiga), 1 (satu) milik pemerintah dan 102 (seratus dua) milik swasta.
 - b. Raudatul Anfal (RA) sebanyak 68 (enam puluh delapan) seluruhnya milik swasta,
 - c. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 7 (tujuh), 2 (dua) milik pemerintah dan 5 (lima) milik swasta.
 - d. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat), 103 (seratus tiga) milik pemerintah dan 21 (duapuluh satu) milik swasta.
 - e. Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 19 (Sembilan belas) semuanya milik swasta,
 - f. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 35 (tigapuluh lima), 11 (sebelas) milik pemerintah dan 24 (duapuluh empat) milik swasta.
 - g. Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 16 (enam belas), 1 (satu) milik pemerintah dan 15 (lima belas) milik swasta.
 - h. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 18 (delapan belas), 6 (enam) milik pemerintah dan 12 (dua belas) milik swasta
 - i. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 26 (duapuluh enam), 3 (tiga) milik pemerintah dan 23 (duapuluh tiga) milik swasta
 - j. Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 8 (delapan), 1 (satu) milik Pemerintah dan 7 (tujuh) milik swasta
 - k. Perguruan Tinggi sebanyak 12 (dua belas) seluruhnya milik swasta.
3. Sarana kesehatan di Kota Cimahi terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) seluruhnya milik pemerintah.
 - b. Puskesmas sebanyak 13 (tiga belas) seluruhnya milik pemerintah.
 - c. Klinik Pratama sebanyak 33 (tiga puluh tiga), 1 (satu) milik pemerintah dan 32 (tigapuluh dua) milik swasta.

- d. Klinik Utama sebanyak 4 (empat) semuanya milik swasta.
- e. Laboratorium Kesehatan sebanyak 8 (delapan) semuanya milik swasta.
- f. Rumah Sakit sebanyak 7 (tujuh), 2 (dua) milik pemerintah dan 5 (lima) milik swasta.
4. Sarana kesehatan peribadatan di Kota Cimahi terdiri dari :
 - a. Masjid sebanyak 220 (dua ratus duapuluh) seluruhnya milik swasta.
 - b. Gereja sebanyak 8 (delapan) seluruhnya milik swasta.
 - c. Pura sebanyak 1 (satu) milik swasta.
5. Bangunan Cagar Budaya di Kota Cimahi sebanyak 29 (duapuluh sembilan), 14 (empat belas) milik pemerintah dan 15 (lima belas) milik swasta :
6. Mengacu pada pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang persyaratan administrasi bangunan gedung, bangunan sosial budaya di Kota Cimahi telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan undang-undang.
7. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 telah terpenuhi dalam pelaksanaan penyelenggaraan bangunan sosial budaya di Kota Cimahi
8. Mengacu kepada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) penyelenggaraan bangunan sosial budaya di Kota Cimahi telah sesuai dengan arahan pola ruang dan peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam RDTR Kota Cimahi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung,,” *Peratur. Pemerintah No. 36*, no. 2, p. 81, 2005.
- [2] P. M. P. Umum, “Pedoman Persyaratan Teknis dan Bangunan Gedung,,” *Peratur. Menteri Pekerj. Umum*, vol. 1, no. January, 2006.
- [3] Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” 2017.
- [4] I. D. Abjan Samad, Mudar Safi, “IMPLEMENTASI MODEL SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE (SDLC) PADA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI BERBASIS WEB KELURAHAN TOMALOU KOTA TIDORE KEPULAUAN,,” *IJIS-Indonesia J. Inf. Syst.*, vol. 9, no. September, pp. 252–254, 2024, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/260171-sistem-informasi-pengolahan-data-pembeli-e5ea5a2b.pdf>.
- [5] A. Zakir, “IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FRAMEWORK YII PADA APLIKASI BERBASIS WEB,,” *InfoTekJar (Jurnal Nas. Inform. dan Teknol. Jaringan)*, vol. 2, no. 1, 2017, doi: 10.30743/infotekjar.v2i1.159.
- [6] J. Jumadi and S. Widiadi, “Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis Web untuk Manajemen Pemanfaatan Air Tanah menggunakan PHP, Java dan MySQL Spatial (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas),” *Forum Geogr.*, vol. 23, no. 2, 2009, doi: 10.23917/forgo.v23i2.5006.
- [7] A. Jailani and M. A. Yaqin, “Pengujian Aplikasi Sistem Informasi Akademik menggunakan Metode Blackbox dengan Teknik Boundary Value Analysis,,” *J. Autom. Comput. Inf. Syst.*, vol. 4, no. 2, 2024, doi: 10.47134/jacis.v4i2.78.
- [8] M. A. Taufan, D. S. Rusdianto, and M. T. Ananta, “Pengembangan Sistem Otomatisasi Use Case Diagram Berdasarkan Skenario Sistem Menggunakan Metode POS Tagger Stanford NLP,,” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 6, no. 8, 2022.
- [9] H. G. Mangunsong and T. A. Kurniawan, “Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan dan Barang Proyek Pemeliharaan Industri Berbasis Web (Studi Kasus: PT. Karunia Utama Maju),” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 9, no. 4, pp. 2548–964, 2025, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>.